

**PENERAPAN TARIF PPN TERHADAP PERATURAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG UU HPP**

**DETERMINATION OF VAT RATES ON REGULATION NUMBER 7  
OF 2021 CONCERNING THE HPP LAW**

**Delsy Delfia Salamor**

Politeknik Saint Paul, Indonesia  
dsalmor@gmail.com

**Abstrak**

PPN merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk konsumsi masyarakat. Dengan begitu PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan nilai, biaya tambahan ditanggung oleh pelaku usaha yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selain itu, kenaikan PPN awalnya naik sebesar 10% yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 42 Tahun 2009 merupakan dasar hukum PPN dan PPNBM (pajak penjualan atas barang mewah), dirubah menjadi 11% pada 1 April 2022 yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kemudian akan meningkat menjadi 12% lagi pada 1 Januari 2025. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui Penerapan Tarif PPN terhadap Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang UU HPP.

**KATA KUNCI: PPN, PKP, Tarif Pajak, Undang-Undang HPP**

**Abstract**

VAT stands for Value Added Tax. This tax is a source of government revenue for public consumption. Thus, VAT is a tax imposed on sales transactions carried out with the aim of creating value, the additional costs are borne by business actors who have become Taxable Entrepreneurs (PKP). In addition, the increase in VAT initially increased by 10% as regulated in Law (UU) no. 42 of 2009 is the legal basis for PPN and PPNBM (sales tax on luxury goods), changed to 11% on April 1, 2022 which is regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). Then it will increase to another 12% on January 1, 2025. The purpose of this article is to find out the application of the VAT rate to Regulation Number 7 of 2021 concerning the HPP Law.

**KEYWORDS: VAT, Taxable Enterprises, Tax Rate, HPP Law.**

**1. PENDAHULUAN**

Tarif PPN adalah jenis pajak tidak langsung. Artinya PPN dibayar oleh pihak lain yang bukan wajib pajak. Sederhananya, ketika seorang konsumen melakukan transaksi untuk membeli atau menjual barang atau jasa, mereka dikenakan biaya beberapa rupiah untuk transaksi tersebut karena barang dan jasa yang dibeli dianggap bernilai tambah karena beredar dari penjual ke konsumen. Penerapan tarif ini dilakukan dengan tujuan dapat menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat, juga meningkatkan penerimaan APBD dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti bantuan sosial. selain itu juga keputusan ini dinilai tepat menginggit tarif PPN di Indonesia masih dibawah rata-rata tarif global. Tetapi setidaknya ada beberapa fasilitas atau insentif Pajak

Pertambahan Nilai yang bisa dimanfaatkan Oleh PKP diantaranya PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan, Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah dan PPN tarif 0 %.

## 2. DASAR TEORI

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksa tanpa adanya balas saja.

(Waloyu, 2011) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang merupakan bagian dari sistem reformasi pajak dengan tujuan penguatan ekonomi dan percepatan pembangunan nasional.

## 3. PEMBAHASAN

Dasar hukum utama penerapan PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983 dan perubahannya, yaitu UU No. 11 Tahun 1994, UU No. 18 Tahun 2000 dan UU No. 42 Tahun 2009. Melalui Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Tarif PPN, awalnya 10%, akan berubah menjadi 11% pada 1 April 2022 dan akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dikenakan PPN atas konsumsi BKP dan/atau JKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, dikenakan PPN 0% atas ekspor BKP dan/atau JKP untuk konsumsi di luar daerah pabean. Seperti kita ketahui, banyak pemilik usaha kecil dengan batasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dapat memilih sertifikasi PKP Dalam menghitung pajak penjualan yang terutang oleh PKP, ada yang disebut pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dikenakan PKP ketika menjual produk. Pajak Masukan, di sisi lain, adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP ketika membeli, memperoleh atau memproduksi produk. Tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi dua yaitu tarif umum dan tarif khusus. Seiring dengan adanya tarif baru, maka tarif PPN 10% akan berakhir. Seperti disebutkan di atas, penerapan kenaikan tarif PPN berdasarkan undang-undang HPP baru-baru ini dilakukan secara bertahap :

1. Tarif Umum
  - a. Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022
  - b. Tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan 1 Januari 2025
2. Tarif Khusus, Tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

Karena adanya UU HPP yang mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap, Pemerintah mewajibkan PKP yang beredar dalam suatu usaha dalam suatu tahun anggaran tidak boleh melebihi jumlah tertentu, dan jumlah tertentu yang lebih rendah. atau dibebankan Ini menekankan pengumpulan dan pelaporan PPN atas jumlah Tarif final pengajuan BPK dan/atau JKP. UU HPP Permohonan Pajak Penjualan mengubah peraturan tentang penghitungan, pemungutan, dan pembayaran pajak penjualan. Saat menghitung PPN, tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP), yang meliputi harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dll untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Tarif PPN final kemudian diterapkan pada jenis barang/jasa tertentu atau sektor ekonomi tertentu untuk menyederhanakan pemungutan PPN. Misalnya, 1%, 2%,

atau 3% dari omzet bisnis diatur oleh PMK. Hal ini dimaksudkan agar pemungutan tariff PPN atas barang/jasa tertentu atau bidang usaha tertentu menjadi nyaman dan mudah.

#### **4. KESIMPULAN**

Tarif PPN adalah jenis pajak tidak langsung. Artinya PPN dibayar oleh pihak lain yang bukan wajib pajak. Sederhananya, ketika seorang konsumen melakukan transaksi untuk membeli atau menjual barang atau jasa, mereka dikenakan biaya beberapa rupiah untuk transaksi tersebut karena barang dan jasa yang dibeli dianggap bernilai tambah karena beredar dari penjual ke konsumen. Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tarif PPN dapat berubah setiap Tahunnya dan kita dapat mengetahui tarif PPN yang berlaku sekarang yang telah diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU HPP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Admin. (2021, 11 27). Tarif PPN Di UU HPP Terbaru. Retrieved from Frconsultant Indonesia.
- [2] Cermati. (2022, 04 01). Tarif PPN 11% Resmi Berlaku, Ini Barang yang Kena dan Bebas PPN. Retrieved from Cermati.
- [3] Klik, P. (2022, 08 15). Pajak Pertambahan Nilai Dan Peraturan PPN 11 Persen. Retrieved from Pajak Klik.
- [4] Kurniasih, W. (2022, 10 03). Pengertian PPN Sejarah, Tarif, dan Jenis Barang Kena Pajak.
- [5] Org, O. (2022, 05 22). Tarif PPN Terbaru Pasca UU HPP. Retrieved from Ortax Org.
- [6] Pajak, O. (2018, 08 14). PPN Pengertian, Tarif dan Jenis Barang yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Retrieved from Online pajak.
- [7] Mardiasmo. (2016, 3). Mardiasmo. Cara Perhitungan Pph Badan.
- [8] Waloyu. (2011, 9). Waloyu. Pengertian PPN Menurut Para ahli.
- [9] 2021, U.-U. N. (2021). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.